

IMPLEMENTASI PENDEKATAN ONE HEALTH MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT ZOONOSIS RABIES DI PROVINSI BANTEN

Ari Mardiana^a, Delly Maulana^b, Titi Stiawati^c

^{abc}Administration Public Department, Sultan Ageng Tirtayasa University, Serang Indonesia
E-mail: drh_ari08@yahoo.co.id

ABSTRAK

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang mematikan dan masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendekatan One Health melalui *Collaborative Governance* dalam pengendalian rabies di Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan penelitian mengenai implementasi One Health melalui *Collaborative Governance* dalam pengendalian zoonosis rabies di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar-sektor telah dilakukan melalui program vaksinasi massal pada hewan penular rabies (HPR), surveilans kasus rabies, edukasi masyarakat, dan pengelolaan anjing liar. Namun, tantangan seperti koordinasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya keterlibatan pihak yang berkolaborasi masih menjadi hambatan dalam implementasi One Health. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan One Health efektif dalam mengintegrasikan upaya pengendalian rabies, tetapi diperlukan peningkatan kapasitas, komitmen politik, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: One Health, Rabies, Kolaborasi, Kesehatan manusia, Kesehatan hewan.

ABSTRACT

Rabies is a deadly zoonosis and a public health problem in Banten Province. This study analyzes the implementation of the One Health approach through *Collaborative Governance* in controlling rabies in Banten Province. The research method uses a qualitative approach with data collection through literature studies from various reading sources that are relevant to research on the implementation of One Health through *Collaborative Governance* in controlling rabies zoonosis in Banten Province. The results of the study indicate that inter-sectoral collaboration has been carried out through a mass vaccination program for rabies-transmitting animals (HPR), rabies case surveillance, community education, and management of stray dogs. However, challenges such as suboptimal coordination, limited resources, and low public awareness are still obstacles in the implementation of One Health. This study concludes that the One Health approach is effective in integrating rabies control efforts, but it requires increased capacity, political commitment, and active community participation to achieve sustainable success.

Keywords: One Health, rabies, collaboration, human health, animal health.

PENDAHULUAN

Rabies dikenal sebagai penyakit zoonosis yang sangat berbahaya dan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat serta ekonomi. Rabies anjing merupakan penyakit yang mematikan bagi mamalia yang harus menjadi perhatian bagi kesehatan masyarakat maupun konservasi satwa liar (Cleaveland, 1996). Rabies merupakan penyakit zoonosis penting yang telah menyebabkan kematian pada anak-anak setiap tahunnya (Gelolodo et al., 2024). Penyakit ini disebabkan oleh virus dari genus *Lyssavirus*, yang umumnya ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi, terutama anjing. Virus rabies juga dapat menular ke semua spesies mamalia termasuk manusia, anjing, hingga monyet (Hadi, 2020). Virus ini menyerang sistem saraf pusat dan memiliki tingkat fatalitas mendekati 100% jika gejala klinis telah muncul (Woo et al., 2023).

WOAH melaporkan bahwa telah terjadi penularan rabies secara global sebanyak 59.000 pada manusia secara global dan terus mengalami penambahan setiap tahun dengan kasus terbanyak Asia dan Afrika (WOAH Terrestrial Manual, 2023). Anjing merupakan penyebab utama yang berdampak sebanyak 99% terhadap infeksi rabies (Gemechu, 2017). Beban ekonomi rabies secara global cukup memakan dana sangat besar bahkan diperkirakan mencapai US\$ 8,6 miliar per tahun (Kanda et al., 2022). Meskipun rabies dapat dicegah melalui vaksinasi, penyakit ini masih menjadi ancaman di banyak wilayah,

terutama di daerah dengan mobilitas hewan yang tinggi.

Di Indonesia, rabies telah menyebar ke hampir seluruh provinsi, kecuali beberapa daerah yang masih dinyatakan bebas. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penyakit Zoonosis berkontribusi terhadap 60% penyakit menular pada manusia saat ini dan 75% zoonosis berdampak menyebabkan penyakit berbahaya yang berpotensi *pandemic* (Hastuti, 2024).

Faktor utama penyebaran zoonosis seperti rabies adalah rendahnya cakupan vaksinasi hewan, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dalam pemantauan dan pengendalian penyakit (Kementerian Kesehatan, 2010). Peraturan Menteri Kesehatan juga yang tertuang dalam Permenkes No. 1501 tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulannya yaitu Rabies, dalam hal ini artinya Rabies ini menjadi Zoonosis cukup serius karena berpotensi menjadi wabah untuk itulah Rabies harus di kendalikan, bahkan data Dokumen Usulan Pengendalian Rabies di Provinsi Banten dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten ada total Gigitan Hewan Penular Rabies (GBHR) yang terjadi dari tahun 2016-2023 sebanyak 1.552 kasus gigitan seperti yang tertuang dalam Tabel.1 (Dinas Pertanian Provinsi Banten, 2024).

Tabel 1. Rekapitulasi Kasus Gigitan HPR di Provinsi Banten 2016-2023

Kabupaten/ Kota	Tahun															
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	GHPR	Lyssa/ Rabies Positif	GHPR	Lyssa/ Rabies Positif	GHPR	GHPR	GHPR	Lyssa/ Rabies Positif	GHPR	Lyssa/ Rabies Positif	GHPR	Lyssa/ Rabies Positif	GHPR	Lyssa/ Rabies Positif	GHPR	Lyssa/ Rabies Positif
Kota Serang	2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	29	0	80	0
Kabupaten Serang	11	0	7	0	0	10	15	0	10	0	2	0	10	0	25	0
Kota Cilegon	0	0	2	0	0	25	21	0	25	0	36	0	46	0	87	0
Kabupaten Lebak	0	0	20	0	0	7	35	0	7	0	4	0	34	0	69	0
Kabupaten Pandeglang	21	0	11	0	53	22	67	0	22	0	30	0	32	0	46	0
Kota Tangerang	0	0	0	0	0	2	13	0	2	0	7	0	5	0	85	0
Kota Tangerang Selatan	9	0	43	0	0	18	6	0	18	0	12	0	66	0	122	0
Kabupaten Tangerang	0	0	1	0	0	1	31	0	1	0	9	0	32	0	141	0
Total	43	0	85	0	53	85	192	0	85	0	100	0	254	0	655	0

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan data Roadmap Pembebasan Rabies di Pulau Jawa 2024-2029 dari Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian 2024, Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam pengendalian

rabies. Data Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2023-2024 juga menunjukkan sepanjang dua tahun terakhir Provinsi Banten telah mengalami kasus gigitan hewan sebanyak 1.435 gigitan (Hastuti, 2024).

Tabel 2. Data Kasus Gigitan GHPR di Provinsi Banten tahun 2023-2024

DATA KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES (GHPR)		
Wilayah Penularan	2023	2024
Kab. Pandeglang	49	25
Kab. Lebak	103	72
Kab. Tangerang	212	167
Kab. Serang	25	18
Kota Tangerang	150	72
Kota Cilegon	95	37
Kota Serang	101	17
Kota Tangerang Selatan	241	51
Total Pembayara	976	459

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan data total kasus gigitan sebanyak 1.435 gigitan dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang di publikasi pada tahun lalu menunjukkan penurunan penyebaran data kasus gigitan hewan penular rabies namun tetap menjadi kewaspadaan pemerintah Provinsi Banten dalam mengendalikan penyebaran rabies (Hastuti, 2024) . Hal ini menunjukkan potensi risiko penularan rabies yang tinggi, terutama mengingat letak geografis Banten yang berdekatan dengan wilayah endemis rabies seperti Sukabumi. Upaya pengendalian rabies di Banten telah dilakukan melalui berbagai program, seperti vaksinasi massal, surveilans kasus, dan edukasi masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya cakupan vaksinasi, populasi anjing liar yang tidak terkendali, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama.

Gambar 1. Pendekatan *One Health*



Sumber : World Health Organization (WHO), 2021

Pendekatan *One Health* merupakan pendekatan paling efektif untuk mengatasi penyakit zoonosis seperti rabies, terutama di Banten yang merupakan wilayah yang tingginya interaksi hewan dan manusia. *One Health* menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan

mengendalikan penyakit yang melibatkan interaksi antara manusia, hewan, dan ekosistem. Implementasi *One Health* dalam pengendalian rabies memerlukan koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan Dinas Lingkungan Hidup, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Namun, implementasi *One Health* di Banten masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Penelitian terbaru menunjukkan pendekatan *One Health* telah berevolusi dari sekadar kolaborasi sektoral menjadi kerangka sistemik yang mengintegrasikan urusan sosial, ekologi, dan kebijakan. Telah ada beberapa hasil penelitian mengenai implementasi pendekatan *One Health* dan *Collaborative Governance* dalam pengendalian rabies. Dalam penelitian *One Health Approach to Zoonosis: Integrating Medicine, Veterinary Science and Environmental Science*, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara ilmu kedokteran, kedokteran hewan, dan ilmu lingkungan dalam mengatasi zoonosis (Mukhtar & Badshah, 2023).

Pendekatan *One Health* berhasil mengurangi angka Human African Trypanosomiasis (HAT) melalui kolaborasi antara petugas kesehatan, layanan veteriner, dan entomology dengan melakukan langkah-langkah surveilans aktif, pengendalian vektor (lalat tsetse), dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti pertanian dan urbanisasi juga turut memengaruhi penyebaran zoonosis sehingga perlu adanya praktik konservasi dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Studi lain *Nationally and locally-initiated One Health approach in controlling rabies in West Kalimantan*, Indonesia yang konsentrasi pada evaluasi efektivitas pendekatan *One Health* dengan berkolaborasi lintas sektor antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam

pengendalian rabies di tiga wilayah: Ketapang, Sanggau dan Pontianak. Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa keberhasilan One Health sebagai langkah kolaboratif dalam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk menurunkan angka kematian rabies dilakukan dengan sistem terintegrasi dengan *platform* SIZE 2.0 untuk pelaporan terintegrasi. Efektivitas keberhasilan pengendalian rabies juga ditentukan oleh pendekatan kolaborasi yang menggunakan metode *top down* atau *bottom up* (Aptriana et al., 2022). Temuan ini menegaskan bahwa One Health kini dipandang sebagai pendekatan holistik yang memadukan ilmu kedokteran, ekologi, dan ilmu sosial, sekaligus menuntut adaptasi kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal.

Dengan mempertimbangkan lanskap penelitian yang telah ada, penelitian ini tidak hanya menganalisis kolaborasi lintas sektor, tetapi juga mengeksplorasi interaksi kompleks antara aspek teknis, lingkungan, dan sosio-kultural dalam pengendalian rabies di Banten. Penulis juga berusaha menganalisis implementasi pendekatan *One Health* dengan mengkombinasikan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang dalam pengendalian rabies di Provinsi Banten. Fokus utama penelitian ini yaitu mengidentifikasi tantangan kolaborasi yang dihadapi dalam kolaborasi lintas sektor, mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan, serta merumuskan strategi yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan masalah rabies di Provinsi Banten dengan mempertimbangkan seluruh instrument yang tersedia untuk pengendalian rabies baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Penelitian ini menyajikan perspektif baru yang membedakan dari penelitian sebelumnya dengan menekankan integrasi pemangku kepentingan lokal dengan melibatkan masyarakat lokal dalam kolaborasi One Health, yang sering diabaikan dalam analisis mengenai pendekatan One Health.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang

efektivitas pendekatan *One Health* dalam konteks lokal, serta menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mencapai eliminasi rabies di Provinsi Banten. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur dan praktik terbaik dalam implementasi *One Health*, khususnya dalam pengendalian penyakit zoonosis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupaya mengungkap fakta, situasi, fenomena, serta kondisi yang terjadi selama proses penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dalam kasus tertentu, metode kualitatif bersifat holistik, interpretatif, dan berupaya memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok dalam konteks tertentu yang dalam hal ini kolaborasi antar sektor Kesehatan manusia, hewan dan lingkungan dalam pengendalian Rabies di Provinsi Banten. Istilah kualitatif juga mengacu pada penekanan terhadap proses penelitian yang fleksibel dan tidak ketat (Noor Z., 2015).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan Studi Literatur (*Library Research*). Sumber referensi yang dikumpulkan dari kegiatan membaca, menganalisis, serta menghubungkan informasi dengan fokus penelitian melalui buku, jurnal, dan berita dari media digital yang relevan dengan topik *One Health* dalam pengendalian zoonosis. Dari data yang terkumpul kemudian dilakukan teknik analisis data sebagai suatu metode yang bertujuan untuk menyusun, mengelompokkan, serta menemukan pola dan makna dari data yang ada. Penelitian ini juga mengadopsi proses sintesis, yaitu membandingkan data yang telah dikumpulkan dengan teori atau konsep

yang relevan. Data yang telah diolah kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan tersebut selanjutnya didukung dengan rekomendasi atau saran dari penulis berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kolaborasi Pengendalian Rabies melalui pendekatan *One Health* di Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 tahun 2012 Tentang Pengendalian Zoonosis di Provinsi Banten Pemerintah Provinsi Banten menginisiasi untuk mengantisipasi dan menanggulangi zoonosis di Provinsi Banten, sehingga memerlukan langkah strategis pengendalian zoonosis secara komprehensif dan terintegrasi (Peraturan Gubernur Banten, 2012). *One Health* menekankan kolaborasi secara holistik, untuk mengimplementasikan yang efektif semua pemangku kepentingan perlu berkolaborasi secara koordinatif untuk bekerja bersama dalam pengendalian zoonosis (Hailat et al., 2023). Dalam kerangka *One Health* juga menekankan bahwa perlu adanya kolaborasi banyak pemangku kepentingan mulai lembaga pemerintah, otoritas kesehatan masyarakat, dokter hewan, ilmuwan lingkungan, hingga keterlibatan masyarakat (Johnson et al., 2018). Langkah kolaboratif juga merupakan upaya berbagai pihak dalam mencapai tujuan (Arrozaa, 2018). Istilah tata kelola sering digunakan menggambarkan hubungan organisasi ke organisasi, tata kelola juga tidak terbatas pada partisipasi lembaga pemerintah namun juga melibatkan berbagai organisasi untuk mencapai tujuan (Noor et al, 2019). Banten telah melakukan tindakan dengan pembuatan peraturan daerah terkait rabies, pelaksanaan vaksinasi massal secara rutin, serta eliminasi anjing secara selektif. Namun, upaya-upaya ini belum sepenuhnya optimal karena kasus rabies masih ditemukan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih

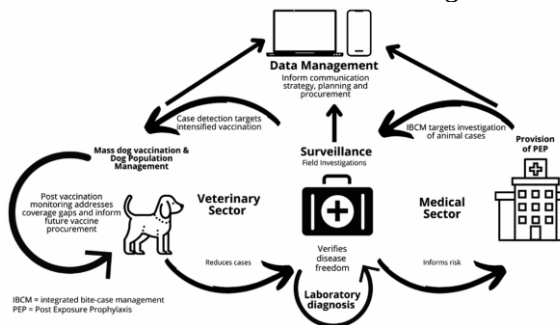
efektif dan efisien untuk mengendalikan penyebaran rabies di Banten.

Dalam pengendalian rabies di Provinsi Banten memerlukan strategi paling efektif, untuk itu strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini maka menggunakan pendekatan *One Health*. Jonathan Rushton (2012) dalam bukunya *The One Health Approach to Zoonoses* menegaskan bahwa *One Health* melihat penyakit zoonosis sebagai masalah sistemik yang melibatkan interaksi antara manusia, hewan, dan lingkungan (Mukhtar & Badshah, 2023). Sehingga untuk menyelesaikan zoonosis rabies menggunakan *One Health* sangat menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor kesehatan manusia (Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kesehatan hewan (Dinas Pertanian Provinsi Banten, dan lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten).

B. Pengendalian Hewan Penular Rabies (HPR)

Untuk memperkuat pelaksanaan program, dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, guna meningkatkan koordinasi dan dukungan dalam upaya pencegahan rabies. Untuk meminimalisir kegagalan implementasi dan politisasi regulasi publik, maka perlu adanya *Collaborative Governance* sebagai respon solutif dalam menghadapi hal tersebut (Ansell & Gash, 2008). Pelibatan stakeholder ini menjadi kunci penting dalam memastikan program berjalan efektif dan mencapai target yang telah ditetapkan Ansell dan Gash menegaskan bahwa jaringan digunakan untuk bekerjasama dengan masyarakat dengan ruang lingkup yang lebih *plural, informal dan implicit* (Ansell & Gash, 2008)

Gambar 2. Illustration Of *One Health* Scheme For Rabies Prevention And Control Program



Sumber : Vateriaaryworld, 2022

Selain itu, mengacu pada ilustrasi *One Health* seperti gambar dalam penelitian Nationally and locally-initiated *One Health* approach in controlling rabies in West Kalimantan 2022 oleh Aptriana bahwa membentuk program pencegahan dan pengendalian lebih efektif dalam menekan angka rabies (Aptriana et al., 2022). Dalam rangka pengendalian rabies di Provinsi Banten, dibentuk Tim Koordinasi Daerah (Tikorda) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 dalam rangka melakukan pencegahan penularan rabies di Provinsi Banten. Tikorda ini dibentuk oleh gubernur dan bupati/wali kota, dengan tanggung jawab utama mendukung pelaksanaan pencegahan dan pengendalian rabies sesuai roadmap yang telah ditetapkan. Tikorda dipimpin oleh sekretaris daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan terdiri dari:

1. Tim Surveilans Terpadu yang bertugas memantau dan mengumpulkan data terkait kasus rabies secara terintegrasi.
2. Tim Surveilans berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan kasus rabies.
3. Tim Respon Cepat dalam menangani kasus rabies dan melakukan investigasi lapangan. Pemerintah daerah juga dapat menambahkan tim lain ke dalam Tikorda sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Keberadaan Tikorda ini memastikan bahwa strategi pencegahan dan pengendalian rabies dilaksanakan secara terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

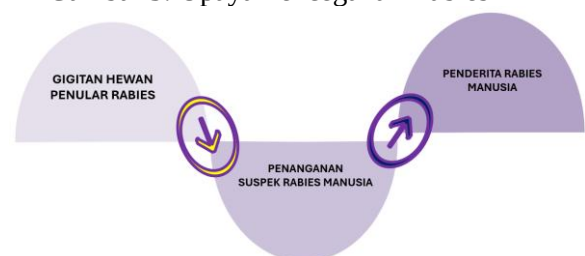
Dengan langkah-langkah ini, upaya pengendalian rabies di Provinsi Banten diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan, mengurangi risiko penularan, dan melindungi kesehatan masyarakat serta hewan secara menyeluruh.

Kolaborasi ini menggambarkan upaya terstruktur dan terintegrasi dalam pengendalian rabies, melibatkan vaksinasi, partisipasi masyarakat, kolaborasi stakeholder, serta pembentukan tim koordinasi daerah untuk memastikan keberhasilan program.

C. Pengendalian Rabies Pada Manusia

Rabies umumnya ditularkan melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi, seperti anjing, kucing, kelelawar, dan hewan liar lainnya. Penyakit ini sangat sangat cepat dan cukup berbahaya karena hampir selalu berakibat fatal jika sudah menunjukkan gejala klinis. Oleh karena itu, pencegahan sangat penting untuk melindungi manusia dari rabies.

Gambar 3. Upaya Pencegahan Rabies



Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Banten, 2024

Pada alur yang di berikan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten (2024) maka upaya pencegahan rabies di lakukan yang salah satunya di kendalikan pada manusia dengan tiga tindakan sebagai berikut :

[illegible]

Kabupaten Pandeglang	-	-	-	-	-	-	1 lokasi	1 lokasi
-------------------------	---	---	---	---	---	---	----------	----------

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan informasi dokumen Usulan Banten Bebas Rabies bahwa data menunjukkan Dinas Pertanian Provinsi Banten telah melakukan kegiatan KIE rabies kepada Masyarakat lokal di dua lokasi di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Kegiatan ini dilakukan karena terdapat laporan kasus gigitan dan tingginya aktifitas pamoroan oleh masyarakat sehingga kegiatan KIE rabies difokuskan ke wilayah tersebut, adapun hal lain kemudian di lakukan juga edukasi melalui :

1. Pelatihan Vaksinasi HPR (Hewan Penular Rabies) diberikan kepada petugas dinas, dokter hewan, dan kader desa untuk meningkatkan kemampuan teknis vaksinasi massal pada anjing dan kucing. Pelatihan ini mencakup teknik penanganan hewan yang aman, metode penyuntikan yang benar, serta sistem pencatatan vaksinasi.
2. Pelatihan Tatalaksana Kasus GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies) difokuskan pada edukasi tenaga kesehatan dan kader masyarakat mengenai pertolongan pertama korban gigitan, termasuk prosedur pencucian luka yang benar, pelaporan kasus, dan observasi hewan penggigit.
3. Penyuluhan masyarakat dilakukan melalui kampanye "Anjing Sehat, Bebas Rabies" yang disebarluaskan via media sosial dan pertemuan desa. Masyarakat diedukasi tentang 5 langkah penanganan gigitan anjing: (1) cuci luka dengan sabun, (2) segera ke Puskesmas, (3) lapor ke dinas terkait, (4) observasi hewan, dan (5) vaksinasi bila diperlukan.
4. Pemanfaatan Dana Desa diarahkan untuk mendukung program vaksinasi gratis, sterilisasi hewan liar, serta pembangunan kandang kolektif sebagai tempat observasi hewan terduga rabies.
5. Pembinaan Kader Siaga Rabies melibatkan pembentukan tim di tingkat desa/kecamatan yang bertugas melakukan deteksi dini kasus gigitan, edukasi warga, serta pendampingan vaksinasi hewan peliharaan.

Tabel 4. Data Vaksinasi HPR di Provinsi Banten Tahun 2016-2023

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Serang	300	30	32	50	120	156	32	400
Kabupaten Serang	64	214	107	119	248	306	107	400
Kota Cilegon	200	300	300	300	400	420	300	200
Kabupaten Lebak	746	746	750	671	500	566	386	500
Kabupaten Pandeglang	320	320	315	200	274	449	315	500
Kota Tangerang	753	566	543	548	401	1213	1.543	200
Kota Tangerang Selatan	*)	*)	321	332	110	497	321	300
Kabupaten Tangerang	*)	*)	*)	*)	330	958	100	500
Total	2.381	2.131	2.368	2.203	2.383	4.565	3.068	3.200

Keterangan : *) Data tidak dilaporkan oleh Dinas Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Melalui berbagai upaya ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam menurunkan kasus rabies secara signifikan di Banten, menuju target bebas rabies 2029.

D. Penguatan Surveilans dan Monitoring

Roadmap Pembebasan Rabies di Pulau Jawa 2024-2029 menjadi peta pemerintah Provinsi Banten untuk menciptakan langkah kolaboratif melalui pendekatan *collaborative governance* sebagai model tata kelola (governance) yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, untuk bersama-sama mengatasi masalah publik yang kompleks yang dalam hal ini pengendalian zoonosis rabies dengan cara membentuk penguatan surveilans dan monitoring terhadap populasi anjing di Provinsi Banten.

Tabel 5. Populasi Anjing pada daerah yang tertular Rabies di Pulau Jawa

No	Provinsi	Jumlah Populasi
1	Jawa Barat (Sukabumi, Bandung Barat, Bandung Selatan)	200.000
2	Banten (Lebak, Pandeglang)	30.000
Total		230.000

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian 2024

Berdasarkan data Roadmap Pembebasan Rabies di Pulau Jawa 2024-2029 dari Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian 2024 menunjukkan data total 30.000 populasi anjing hidup di dua kabupaten yaitu : Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Maka perlu ada langkah strategis untuk melakukan upaya penguatan surveilans dan monitoring dalam pengendalian rabies di Provinsi Banten dilakukan melalui serangkaian langkah sistematis dan terintegrasi. Setiap petugas yang menangani rabies secara langsung wajib divaksinasi dengan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk memastikan keamanan dan keselamatan dalam penanganan kasus. Vaksinasi anjing dilaksanakan oleh tenaga kesehatan hewan

pemerintah, mandiri, organisasi masyarakat, atau dengan bantuan instansi pendidikan di bidang kesehatan hewan. Setiap anjing menerima layanan vaksinasi minimal satu kali dalam setahun, atau dilakukan vaksinasi 100% populasi anjing di desa kasus gigitan dan desa sekitarnya jika terjadi kasus gigitan yang didiagnosis rabies pada manusia atau hewan.

Untuk memastikan kualitas pelayanan vaksinasi, standar kesejahteraan hewan menjadi prioritas. Survei pasca vaksinasi dilakukan oleh tim survei untuk menghitung estimasi cakupan vaksinasi dan populasi anjing secara keseluruhan. Selain itu, setiap anjing berpemilik diberikan tanda atau identifikasi menggunakan sistem iSIKHNAS atau sistem identifikasi lain yang diakui oleh organisasi hewan kesayangan.

Dalam hal penanganan kasus, setiap kasus rabies pada manusia atau hewan ditindaklanjuti dengan pengambilan dan pengiriman sampel otak anjing ke laboratorium veteriner untuk peneguhan diagnosis. Anjing yang menunjukkan tanda rabies, baik yang menggigit manusia maupun tidak, dikoleksi sampel otak atau kepalanya untuk diuji di laboratorium. Anjing yang menggigit manusia, anjing lain, atau hewan lain diobservasi selama 14 hari. Jika mati, sampel otak atau kepala diambil untuk uji laboratorium; jika hidup, dinyatakan tidak tertular rabies.

Investigasi kasus gigitan dilakukan secara menyeluruh. Setiap laporan kasus gigitan pada manusia dari SIZE, Puskesmas, atau masyarakat ditindaklanjuti dengan investigasi awal. Penyidikan awal mencakup pengambilan sampel dari hewan kasus dan hewan terduga, serta pengumpulan data pendukung seperti lokasi kejadian, identitas hewan, jumlah hewan sakit/mati, populasi berisiko, kronologi kejadian, peta penyakit hewan, dan tindakan yang telah dilakukan. Investigasi ini dilakukan dengan pendekatan *One Health*, melibatkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan respons yang komprehensif.

Selain itu, setiap kejadian atau kasus dugaan rabies pada anjing dilaporkan melalui iSIKHNAS sebagai sistem informasi yang telah dibuat untuk melaporkan

kesehatan hewan, sehingga kemudian Hewan Penular Rabies (HPR) yang mati terduga rabies dilakukan penguburan oleh team bentukan hasil kolaborasi.

Dengan langkah-langkah ini, penguatan surveilans dan monitoring rabies di Provinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian rabies, mengurangi risiko penularan, dan melindungi kesehatan masyarakat serta hewan secara berkelanjutan.

E. Kunci keberhasilan Kolaborasi dalam Pengendalian Penyakit Zoonosis Rabies di Provinsi Banten

Pendekatan *One Health* menjadi kunci dalam mengendalikan penyakit zoonosis seperti rabies di Provinsi Banten. Kemudian dikuatkan oleh pendekatan *Good Governance* sebagai upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholder untuk mencapai maksud tertentu yang tidak hanya menekankan partisipasi Lembaga public saja. Berdasarkan urgensi dan tantangan yang dihadapi, beberapa rekomendasi penting telah diidentifikasi untuk menerapkan *One Health* menggunakan *Collaborative Governance* secara efektif, terutama dalam konteks penyakit zoonosis di Indonesia. Donahue dan Zeckhauser menekankan *Collaborative Governance* sebagai mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan publik dengan cara membina kemitraan dengan organisasi atau individu dalam Masyarakat (Puspaningtyas, 2022).

Selain itu, salah satu aspek kritis dalam kolaboratif adalah kolaborasi multidisiplin, di mana pendekatan *One Health* mempertemukan para ahli dari berbagai bidang, termasuk kedokteran manusia dan hewan, epidemiologi, ekologi, dan ilmu lingkungan, untuk bekerja secara sinergis dalam mengatasi rabies. Para ilmuwan lingkungan juga meneliti faktor lingkungan penentu kesehatan manusia yang kemudian dikembangkan untuk mengurangi risiko zoonosis (Zinsstag et al., 2012). Sistem surveilans penyakit dan peringatan dini juga menjadi komponen penting. Dengan menerapkan *One Health*, sistem surveilans yang komprehensif dapat dibangun untuk memantau populasi hewan dan manusia. Deteksi dan pelaporan wabah rabies secara dini memungkinkan intervensi segera untuk

mencegah penyebaran lebih lanjut. Selain itu, pendekatan ini mendorong penelitian tentang penyakit zoonosis, termasuk asal-usul, dinamika penularan, dan strategi pencegahan rabies. Berbagi data dan temuan antar disiplin dan institusi akan meningkatkan pemahaman tentang penyakit ini dan mendukung intervensi berbasis bukti.

Upaya pencegahan dan pengendalian juga menjadi fokus utama. *One Health* menekankan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko penyakit zoonosis, seperti rabies. Program vaksinasi hewan, peningkatan praktik higienis, dan peningkatan biosekuriti dalam produksi peternakan adalah langkah-langkah penting yang perlu diimplementasikan. Selain itu, faktor lingkungan juga perlu diperhatikan karena kesehatan ekosistem dan lingkungan berperan penting dalam mencegah munculnya penyakit zoonosis. Deforestasi, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat meningkatkan risiko penularan rabies. Oleh karena itu, melindungi habitat alami dan mempromosikan praktik berkelanjutan dapat membantu mengurangi risiko tersebut.

Terakhir, kesadaran dan edukasi masyarakat menjadi komponen kunci dalam penerapan pendekatan *One Health*. Kampanye edukasi dan kesadaran publik perlu digalakkan untuk meningkatkan pemahaman tentang rabies dan cara pencegahannya. Dengan meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku, masyarakat dapat mengadopsi praktik-praktik yang mengurangi penularan rabies.

Dengan mengintegrasikan kolaborasi multidisiplin, sistem surveilans yang kuat, penelitian, upaya pencegahan, dan edukasi masyarakat, pendekatan *One Health* dapat menjadi solusi efektif dalam mengendalikan rabies di Provinsi Banten. Implementasi yang holistik dan terkoordinasi ini diharapkan dapat mengurangi dampak rabies dan meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara keseluruhan (Sinclair, 2019).

F. Tantangan Pengendalian Rabies di Provinsi Banten

Dalam Collaborative Governance Ansell & Gash menekankan ada enam kriteria dalam Collaborative Governance : Pertama, forum

kolaboratif merupakan hasil inisiasi publik; Kedua, partisipan hasil ada dari aktor non pemerintah; Ketiga, partisipan harus terlibat aktif dalam kolaborasi; Keempat, forum harus terorganisasi dengan baik dan harus adanya pertemuan rutin; Kelima, setiap kebijakan kolaboratif harus berdasarkan consensus bersama; Keenam, konsentrasi harus berfokus pada kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Selain itu kepemimpinan kolaboratif dalam Collaborative Governance juga sangat penting untuk membantu stakeholder bisa terfasilitasi dengan baik karena pemimpin merupakan fasilitator dalam kolaborasi (Chrislip & Carl E. Larson, 1994). Dalam hal pengendalian rabies dengan *One Health* melalui Collaborative Governance merupakan langkah kolaboratif yang tentu harus memenuhi kriteria tersebut terutama dalam hal membutuhkan kepemimpinan kolaboratif sebagai fasilitator dalam kolaborasi antar sektor, maka jika tidak mencakup tindakan tersebut kolaborasi dalam upaya pengendalian rabies tidak akan berhasil atau tidak berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil riset penulis mengenai Implementasi Pendekatan *One Health* melalui kolaborasi sektor kesehatan Manusia, Hewan dan Lingkungan dalam Pengendalian Penyakit Zoonosis Rabies di Provinsi Banten menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam upaya pengendalian rabies yang mengancam pencapaian target eliminasi rabies.

Rabies seharusnya menjadi bagian daripada konsentrasi lembaga yang konsentrasi pada bidangnya, namun lembaga yang konsentrasi pada sektor kesehatan hewan sebagai garda terdepan belum menempatkan rabies sebagai prioritas utama. Ketersediaan vaksin rabies untuk hewan masih sangat terbatas, hanya mencakup 10-20% dari kebutuhan aktual. Kondisi ini diperparah dengan distribusi vaksin yang tidak merata dan ketidaktersediaan layanan vaksinasi di beberapa daerah endemis.

Kolaborasi *Good Governance* dengan lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten yang konsentrasi pada kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan melalui pendekatan *One Health* belum berjalan

optimal. Koordinasi antar dinas terkait masih lemah, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang belum jelas. Mekanisme pertukaran data dan informasi antar sektor juga belum terintegrasi dengan baik karena ada banyak faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi. Government of Canada (2008) juga mengemukakan bahwa terhambatnya proses kolaborasi juga terjadi karena beberapa faktor di antaranya yaitu faktor kebudayaan, faktor institusi dan faktor luar kolaborasi politik (Cornthassel & Holder, 2008).

Sistem Surveilans Terpadu Zoonosis (SIZE) sebagai instrumen kunci masih menjadi dinamika internal yang belum digunakan dengan semestinya karena lemahnya keterlibatan antar aktor baik pemerintah maupun masyarakat lokal yang terlibat. Jika mengacu kepada Ansell & Gash bahwa salah satu faktor penting keberhasilan *Collaborative Governance* yaitu keterlibatan antar sektor (Ansell & Gash, 2008). Kapasitas deteksi dini dan respons cepat terhadap kasus rabies belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi persoalan lain. Sistem pelaporan kasus masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara digital karena tidak didukung oleh keterlibatan semua pihak.

Collaborative Governance menekankan kolaborasi antar pihak (Ansell & Gash, 2008), termasuk melibatkan masyarakat lokal dalam kolaborasi ini sebagai kekuatan lokal yang memiliki pengetahuan wilayah sebagai penghubung antara pihak yang berkolaborasi dengan titik persoalan yang terjadi di lapangan. Namun yang menjadi persoalan adalah pemahaman masyarakat lokal yang terlibat tentang kepemilikan hewan penular rabies (HPR) yang bertanggung jawab masih minim. Banyak pemilik hewan yang tidak melakukan vaksinasi rutin dan menolak program sterilisasi. Praktik pemeliharaan anjing liar tanpa pengawasan masih marak ditemui di berbagai wilayah karena masih minimnya dana anggaran karena rabies tidak menjadi prioritas sebagai masalah Kesehatan yang harus dikendalikan.

Tidak optimalnya kolaborasi antar sektor dalam pengendalian rabies di Banten juga disebabkan karena alokasi pendanaan yang

minim. Belum adanya anggaran khusus yang digunakan dalam kolaborasi berbagai sektor dari APBD untuk program pengendalian rabies sehingga berdampak pada belum memadai dan cenderung tidak proporsional dengan beban penyakit yang tumbuh di masyarakat Banten. Ketergantungan pada pendanaan pusat dan donor juga merupakan sebagai lain yang ikut berkontribusi pada ketidakstabilan kolaborasi dalam melaksanakan program. Pemanfaatan dana desa sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mengendalikan rabies di Banten untuk penanggulangan juga belum optimal karena tidak adanya langkah praktis dari pemerintah sebagai kerangka kerja untuk penggunaan dana desa sebagai sumber keuangan yang bisa digunakan untuk melaksanakan program pengendalian rabies di Banten.

Kondisi ini memerlukan penanganan segera melalui penguatan komitmen politik, peningkatan alokasi anggaran, dan perbaikan sistem kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target Banten bebas rabies sesuai roadmap nasional.

KESIMPULAN

Implementasi pendekatan *One Health* dalam pengendalian rabies di Provinsi Banten telah menunjukkan kemajuan karena adanya langkah kolaboratif yang telah berjalan, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi karena mengalami berbagai kendala lapangan. Kolaborasi antar-sektor, peningkatan sumber daya, dan partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan program kolaborasi *One Health* melalui *Collaborative Governance* dalam pengendalian rabies di Banten. Dengan memperkuat implementasi *One Health* berikutnya diharapkan Provinsi Banten dapat mencapai status bebas rabies dan melindungi kesehatan masyarakat serta hewan secara berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *One Health* merupakan solusi paling komprehensif untuk mencapai target eliminasi rabies 2029 di Provinsi Banten. Keberhasilan program memerlukan komitmen politik yang kuat, alokasi sumber daya berkelanjutan, dan partisipasi aktif

masyarakat lokal dalam seluruh aspek pencegahan dan pengendalian rabies.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk pengendalian rabies di Banten untuk periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriana, C. D., Sudarnika, E., & Basri, C. (2022). Nationally and locally-initiated One Health approach in controlling rabies in West Kalimantan, Indonesia. *Veterinary World*, 15(12), 2953–2961. <https://doi.org/10.14202/vetworld.2022.2953-2961>
- Arrozaa, D. L. C. (2018). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Perpustakaan Universitas Airlangga*. <https://repository.unair.ac.id/67685/>
- Chrislip & Carl E. Larson. (1994). Collaborative Leadership: How Citizens and Civic Leaders Can Make a Difference. *Jossey-Bass Publishers*. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0734371x9801800208>
- Cleaveland, S. (1996). Domestic dogs as reservoirs of rabies and canine distemper in the Serengeti. *Veterinary Group Newsletter*, 5(22), 2–4. [Cleaveland_1996_Domestic_dogs_rabies_and_CDV_in_Serengeti.pdf](#)
- Cornthassel, J., & Holder, C. (2008). Who's sorry now? Government apologies, truth commissions, and indigenous self-determination in Australia, Canada, Guatemala, and Peru. *Human Rights Review*, 9(4), 465–489. <https://doi.org/10.1007/s12142-008-0065-3>
- Dinas Pertanian Provinsi Banten. (2024). *Proposal Pengendalian Rabies di Provinsi Banten (Dalam Upaya Penetapan Wilayah Tangerang Raya Bebas Rabies)*.
- Gelolodo, M. A., Sanam, M. U. E., Tangkonda, E., Toha, L. R. W., & Kallau, N. H. G. (2024). *Edukasi Pendekatan One Health dalam Pencegahan Penyakit Zoonosis Rabies pada Sekolah Dasar di Kota Kupang*. 8(2), 192–201.
- Gemechu, R. (2017). Review on Economic Importance's of Rabies in Developing Countries and Its Controls. *Archives of Preventive Medicine*, 2(1), 015–021. <https://doi.org/10.17352/apm.000007>
- Hadi, S. (2020). *Kajian Situasi Rabies Di Wilayah Layanan Balai Besar Veteriner Maros*. 327–334.
- Hailat, E., Amiri, M., Debnath, N., Rahman, M., Nurul Islam, M., Fatima, Z., Khader, Y., & Al Nsour, M. (2023). Strengthening the One Health Approach in the Eastern Mediterranean Region. *Interactive Journal of Medical Research*, 12, e41190. <https://doi.org/10.2196/41190>
- Hastuti. (2024). *Kebijakan dan Situasi Penyakit Rabies di Provinsi Banten Tahun 2024*.
- Johnson, I., Hansen, A., & Bi, P. (2018). The challenges of implementing an integrated One Health surveillance system in Australia. *Zoonoses and Public Health*, 65(1), e229–e236. <https://doi.org/10.1111/zph.12433>
- Kanda, K., Jayasinghe, A., Jayasinghe, C., & Yoshida, T. (2022). A Regional Analysis of the Progress of Current Dog-Mediated Rabies Control and Prevention. *Pathogens*, 11(10), 1–11. <https://doi.org/10.3390/pathogens11101130>
- Kementerian Kesehatan. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan juga yang tertuang dalam Permenkes No. 1501 tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan*. 1501. <https://peraturan.go.id/id/permenkes-no-1501-tahun-2010>
- Leslie, M. J., & Kazmierczak, J. J. (2013). Surveillance for zoonotic diseases. In *Infectious Disease Surveillance: Second Edition* (pp. 143–156).

- <https://doi.org/10.1002/9781118543504.ch12>
- Mukhtar, M. U., & Badshah, F. (2023). One Health Approach to Zoonosis: Integrating Medicine, Veterinary Science and Environmental Science. *International Journal of Agriculture and Biosciences, Zoonosis Volume 1*, 226–236.
<https://doi.org/10.47278/book.zoon/2023.016>
- Noor, Muhammad, Falih Suaedi, A. M. (2019). Collaborative Governance : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melastari
- Noor Z. (2015). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. *Deepublish*, 113.
- Peraturan Gubernur Banten. (2012). *Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2012 mengatur tentang Pengendalian Zoonosis di Provinsi Banten*.
<https://jdih.bantenprov.go.id/storage/plates/peraturan/95Pergub No. 40 Tahun 2012.pdf>
- Puspaningtyas, A. (2022). Collaborative Governance: Sebuah Paradigma? *Politeknik Untag Surabaya*.
<https://publik.untagsby.ac.id/web/beritadetail/collaborative-governance-sebuah-paradigma.html>
- Sinclair, J. R. (2019). Importance of a One Health approach in advancing global health security and the Sustainable Development Goals. *Revue scientifique et technique. International Office of Epizootics*, 1(2).
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31564744/>
- WOAH Terrestrial Manual. (2023). *Rabies (Infection With Rabies Virus and other Lyssaviruses)*.
<https://ictv.global/report/chapter/rhabdoviridae/rhabdoviridae/lyssavirus>
- Woo, P. C. Y., De Groot, R. J., Haagmans, B., Lau, S. K. P., Neuman, B. W., Perlman, S., Sola, I., Van Der Hoek, L., Wong, A. C. P., & Yeh, S. H. (2023). ICTV Virus Taxonomy Profile: Coronaviridae 2023. *Journal of General Virology*, 104(4).
<https://doi.org/10.1099/jgv.0.001843>
- Zinsstag, J., MacKenzie, J. S., Jeggo, M., Heymann, D. L., Patz, J. A., & Daszak, P. (2012). Mainstreaming One Health. *EcoHealth*, 9(2), 107–110.
<https://doi.org/10.1007/s10393-012-0772-8>